



Motif Terjadinya Konflik Intoleransi Pada Masyarakat Nusa Tenggara Barat

Wayan Resmini¹, Abdul Sakban², Julae Pani³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, wayanresmini@ymail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sakban.elfath@yahoo.co.id

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, julaepani629@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Februari 2022

Disetujui: 30 Maret 2022

Kata Kunci:

Motif
Konflik
Intoleransi

ABSTRAK

Abstrak: Komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap dokumen yang bersifat tradisional masih rendah sehingga hukum adat yang ada di masyarakat belum menunjukkan eksistensi sebagai pengontrol sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi motif terjadinya konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan reduksi data menyederhanakan data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya ekonomi masyarakat, masalah asmara, kurang sosialisasi untuk bertoleransi, dan konsumsi minuman yang memabukan khususnya para remaja. Selain itu peran pemerintah daerah belum maksimal sehingga mampu menekan berkurangnya konflik intoleransi.

Abstract: The community's customary law has yet to demonstrate its presence as a social controller due to the local government's weak commitment to protecting traditional documents. The goal of this study is to pinpoint the causes of intolerant disputes among West Nusa Tenggara residents. This study used a qualitative technique, a descriptive analytical framework, and case studies. methods for gathering data that include document analysis, observation, interviews, and literature study. Data analysis employs an interactive analysis paradigm with steps of data simplification, data presentation, and data inference. The study's findings indicate that the lack of employment opportunities, the community's poor economy, problems with romance, a lack of socialization for tolerance, and alcohol consumption, particularly among teenagers, all have an impact on the conflicting causes of intolerance among the people of West Nusa Tenggara. Additionally, local governments' potential to lessen intolerance-related disputes has not been fully utilized.

A. LATAR BELAKANG

Indonesia Timur dikenal dengan kekentalan penerapan hukum adatnya namun dalam pelaksanaannya masih sangat rendah sehingga sangat mudah timbulnya konflik akibat tidak saling menghormati dari perbedaan yang ada. Komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap dokumen yang bersifat tradisional masih rendah sehingga hukum adat yang ada di masyarakat belum menunjukkan eksistensi sebagai pengontrol sosial. Hasil observasi bahwa sebagian pakar menyatakan bahwa Indonesia timur masuk wilayah zona merah karena daerah rawan konflik intoleransi yang masih meningkat. Adapun daerah zona merah adalah NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi selatan, dan Papua.

Zona merah merupakan garis yang menunjukkan daerah tersebut tingkat konflik intoleransi tinggi yakni jumlah tindakan yang dilakukan aparat keamanan 98 tindakan 52% sedangkan jumlah tindakan yang dilakukan kelompok sosial 89 tindakan 48%. Selanjutnya adalah jumlah peristiwa yang dilakukan oleh aparat keamanan 80 peristiwa 51% dan jumlah peristiwa yang dilakukan oleh kelompok sosial 78 peristiwa 49%[1].

Konflik di propinsi NTB berupa konflik antar kampung dan konflik etnis. Konflik antar kampung merupakan bentrokan antar dua lingkungan bertetangga dengan motif hanya masalah sepele, penganiayaan pada salah satu warga kampung hingga memicu penyerangan balik dengan membawa senjata api rakitan, tombak, pedang, parang, dan bambu runcing. Konflik etnis berupa perseteruan antar suku Samawa dengan suku

Bali yang diwarnai perusakan 35 rumah warga asal Bali, satu pura, satu bangunan hotel, pasar Seketeng, toko dan dua kios, serta dua pasar swalayan. Konflik agama merupakan suatu pertikaian antar agama baik antar sesama agama itu sendiri, maupun antar agama satu dengan agama lainnya.

Menurut Yuliatun[2] konflik keberagamaan dan intoleransi kaum radikal yang telah berkembang di masyarakat dipengaruhi oleh isu-isu radikalisme dan intoleransi, konflik bernuansa agama (pembakaran gereja di Ketapang, Jakarta 1999, pembakaran mesjid di Kupang, 1999); Konflik berbasis etnis seperti peristiwa Sambas; Konflik vertikal daerah-pusat (konflik Aceh, Riau, Papua, Poso, Maluku Utara); Konflik partai, dan konflik multi-faktor (multifaceted-based conflicts)[3]. Disintegrasi social melalui media social dapat menyebabkan konflik toleransi[4], keanekaragaman ini berpotensi terjadinya intoleransi dan menimbulkan konflik. Isu agama yang paling sensitive sehingga mudah menimbulkan perdebatan dan ujaran kebencian terhadap umat agama lain di media sosial. Komunikasi resolusi dibutuhkan untuk menangani banyaknya kasus intoleransi beragama di media sosial[5],[6]. Adanya intoleransi politik pada jamaah ahmadiyah bagi jamaah Nahdatul Wathan[7], fanatisme agama dan intoleransi pada pengguna media social dapat mempengaruhi konflik antar individu dan kelompok salah satu faktornya yakni motivasi partisipan dalam penyebaran konten bermuatan fanatisme agama dan intoleransi adalah agar sikap keagamaannya diikuti orang lain. Mereka juga memandang bahwa pemikiran keagamaan yang berbeda adalah sesuatu yang salah dan berusaha untuk membenarkan kesalahan tersebut[8]. Konflik bernuansa SARA mengakibatkan tumpulnya pemerintahan, perekonomian, transportasi dan aktivitas masyarakat. Agama bukan merupakan pemicu utama, tapi lebih berperan sebagai faktor pengiring yang datang belakangan, dimanfaatkan selaku penggalang solidaritas[9]. Unsur agama dapat mempengaruhi kontestan politik dalam pelaksanaan pemelihan kepala desa dengan mengarahkan masa dengan unsur agama tertentu[10], [11].

Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat memiliki dua sisi: konflik dan kesepakatan. Jadi, teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Ahli teori konsensus harus melihat nilai integrasi dalam masyarakat, dan ahli teori konflik harus melihat bagaimana masyarakat tetap bersama dalam menghadapi tekanan ini dengan menyelesaikan konflik dan menggunakan kekerasan. Dahrendorf setuju bahwa masyarakat tidak dapat terbentuk tanpa konsensus dan konflik, yang saling diperlukan[12].

Fisher menggunakan istilah "transformasi konflik" untuk membicarakan situasi secara keseluruhan. 1) Tujuan pencegahan konflik adalah untuk menghentikan terjadinya perkelahian. 2) Resolusi konflik adalah

tentang membuat perjanjian damai untuk menghentikan orang dari kekerasan. 3) Manajemen konflik mencoba menghentikan dan membatasi kekerasan dengan melibatkan orang-orang untuk mengubah perilaku mereka ke arah yang positif. 4) Menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang langgeng antar kelompok yang bertentangan satu sama lain. 5) Transformasi Konflik, yang melihat penyebab konflik sosial dan politik yang lebih luas dan mencoba mengubah kekuatan negatif perang menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif[13].

Belakangan ini, secara teologis, konflik antar pemeluk agama yang berbeda dipandang sebagai konflik agama. Pada hakikatnya dan kenyataannya, kebanyakan konflik antar pemeluk agama yang berbeda disebabkan oleh hal-hal seperti intoleransi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, kegagalan dalam pembangunan, dan sebagainya. Perkelahian antar pemeluk agama yang sama, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, komunitas, atau organisasi masyarakat tertentu, juga merupakan fakta yang tak terbantahkan. Kemudian, perkelahian antar pemeluk agama ini menimbulkan kekacauan sosial yang membuat masyarakat resah dan gelisah. Arifinsyah mengatakan bahwa konflik antar pemeluk agama berbeda merupakan patologi sosial yang disebabkan oleh hal-hal seperti kegagalan sosial, pembangunan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian, agama dijadikan sebagai alat legitimasi sehingga ketika agama dikatakan sebagai sumber konflik dalam masyarakat, orang menganggap bahwa ajaran teologi yang berbeda disalahkan dan dikatakan sebagai sumber utama konflik dan perpecahan. Pada dasarnya, tidak ada agama yang menyuruh pemeluknya untuk berselisih dan berkelahi dengan pemeluk agama lain. Tidak ada keraguan bahwa sejumlah kecil kelompok agama terlibat. Kelompok-kelompok ini bertindak sebagai provokator dan menggunakan agama untuk menyebabkan disintegrasi sosial[14]. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi motif terjadinya konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi kasus. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk mengungkapkan fakta, peristiwa yang terjadi dilapangan[15], pendekatan studi kasus digunakan untuk mengungkapkan motif konflik dalam masyarakat[16]. Informan yang digunakan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan reduksi data atau data reduction. Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan

kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Tahap penyajian data atau data display, Bentuk penyajian data kemudian beragam bisa disajikan dalam bentuk grafik, chart, pictogram, dan bentuk lain. Tahap penarikan kesimpulan atau conclusion drawing.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Konflik Intoleransi

Peristiwa Konflik Sosial Keagamaan di propinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang kompleks, menurut penjelasan Ashanul Khalikin dan Fathuri[17]. Peristiwa konflik social keagamaan dapat digambarkan pada tabel 1 adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Peristiwa Konflik Sosial Keagamaan di Propinsi Nusa Tenggara Barat

No	Tahun	Gambaran Peristiwa	Para Pihak
1	1980	Terjadi mesiat (perang) yang melibatkan komunitas Hindu dari kampung Tohpati dan Sindu, dengan Muslim Karang Taliwang, yang lain disebabkan persoalan pendirian tempat ibadat yang saling berdekatan. Pembangunan masjid yang berdekatan dengan pura, sementara pura telah lama berdiri.	Warga Karang Taliwang dengan Sindu dan Tohpati
2	2000	Warga Bali di Tohpati yang sedang merayakan Nyepi yang merasa terganggu oleh suara pembacaan sholawat dalam kegiatan selakaran. Meski sempat menegang, konflik dapat segera dikendalikan sehingga tidak meluas menjadi kerusakan terbuka.	Warga Tohpati dan warga sekitarnya
3	2001	Terjadi bentrok warga muslim Nyangget dengan Kampung Saksari yang Hindu. Kedua	Warga Nyangget dengan Saksari

		kampung ini terletak di sebelah timur Karang Taliwang. Pemicunya adalah perkelahian antar pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk.	
4	2003-2005	Konflik terjadi antara warga masyarakat Petemon dan Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Ampenan, yang masih mempunyai hubungan keluarga/kerabat, suku/etnis, dan agama yang sama (Islam). Persoalan dipicu oleh batas tanah pekuburan (luas batas wilayah).	Warga masyarakat Petemon dan Karang Genteng
5	2006	Ecudus warga jamaah Ahmadiyah yang mengalami kekerasan, berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat yang ditampung di Asrama Transito Majeluk, Kecamatan Mataram. Hingga kini belum ada penyelesaian yang tuntas	Warga Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat
6	2008	Konflik antar warga lingkungan Sindu (Bali, Hindu) dengan warga lingkungan Nyaget (sasak/Islam). Konflik ini menimbulkan 1 korban jiwa/meninggal dunia dan 3 orang luka-luka	Warga Lingkungan Sindu dan Warga Lingkungan Nyaget
7	2011	Perkelahian antar pemuda yang berujung bentrok antar Warga Lingkungan Karang Bagu dan Warga Lingkungan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara. Kedua pihak yang	Warga Lingkungan Karang Bagu dan Warga Lingkungan Karang Taliwang

		bertikai samasama bersuku Sasak dan beragama Islam. Tidak terdapat korban jiwa, hanya luka-luka		11	2013	Terjadi perselisihan antara warga Lingkungan Penjarakan Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, dengan sekelompok orang penganut aliran Salafi/Wahabi, dimana warga masyarakat lingkungan Penjarakan menolak aktivitas pengikut jama'ah ini.	Warga Lingkungan Pejarakan dan penganut aliran Salafi/Wahabi
8	2012	Perselisihan antara pemuda yang dipengaruhi oleh minuman keras, antara Warga Lingkungan Tohpati (Bali, Hindu) dengan Warga Lingkungan Karang Mas-Mas (Sasak/Islam) di wilayah Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara. Perselisihan berubah menjadi bentrok massa kedua lingkungan yang menimbulkan satu orang korban jiwa berasal dari Kelurahan Karang Mas-Mas	Warga Lingkungan Tohpati dan Warga Lingkungan Karang Mas-Mas				
9	2013	Bentrok kedua (lanjutan) antara pemuda warga Lingkungan Tohpati dengan pemuda Warga Lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara. Kali ini korban jiwa meninggal dunia dari pemuda Lingkungan Tohpati.	Warga Lingkungan Tohpati dan Warga Lingkungan Karang Mas-Mas (lanjutan)				
10	2013	Perkelahian antar pemuda dari Warga Lingkungan Pandas Salas Kelurahan Mayura dengan pemuda dari Warga Lingkungan Tohpati Kelurahan Cakra Utara, yang membias sehingga melibatkan warga kedua lingkungan yang beragama Hindu/Bali dan Islam/Sasak. Terdapat korban luka-luka dan kerusakan ringan rumah ibadah.	Warga Lingkungan Tohpati dan Warga Lingkungan Pandan Salas				
				12	2014	Terjadi bentrokan masyarakat karang taliwang dengan monjok gara-gara masalah sampah (tempat pebuangan akhir sampah). Karena pada dasarnya bahwa karang taliwang merupakan salah satu daerah wisata kuliner sehingga sampah yang dibuang oleh masyarakat monjok berdekatan dengan daerah lingkungan karang taliwang sehingga dengan adanya peristiwa tersebut terjadilah konflik kedua lingkungan tersebut saling serang menyerang hingga menimbulkan korban jiwa, luka berat dan luka ringan	Warga Karang Taliwang bentrok dengan warga Monjok
				13	2017	Peristiwa ini bermula ketika di Lingkungan Asak Kelurahan Pagutan Barat berlangsung prosesi penjemputan mempelai perempuan ke Pura Pemaksan Pagutan Lingkungan Karang Buaya Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram. Penjemputan itu melalui rute	Bentrok antara warga lingkungan Presak dengan lingkungan warga Asak

Lingkungan Asak melewati Jalan Banda Seraya, Simpang 4 Pagutan, dan Jalan R.M. Panji Anom. Iring-iringan penjemputan penganten ini disemarakan dengan musik Gamelan dimana ruas Jalan Banda Seraya konon telah ada kesepakatan orang-orang tua terdahulu antara Hindu dan Sasak bahwa tidak diperkenankan ada bunyi-bunyian atau musik gamelan.

2. Motif Konflik Intoleransi di Nusa Tenggara Barat

Penyebab konflik intoleransi dalam masyarakat sasak secara umum dipengaruhi oleh keadaan masyarakatnya yang beragam seperti agama, etnis, bahasa, suku, dan ras, kemudian jumlah penduduk semakin meningkat, kurangnya pemberdayaan kepada generasi muda, kurangnya rasa toleransi diantara sesama masyarakat sasak.

Menurut Johan Firman tokoh adat di lingkungan petemon menjelaskan bahwa:

“konflik intoleransi terjadi karena masalah ekonomi, pengangguran, konflik terjadi pada tahun 1993 yaitu konflik lingkungan karang genteng dengan lingkungan petemon, selain itu hal yang menimbulkan konflik antar perkampungan karena adanya kesalahpahaman antara kedua perkampungan lingkungan karang genteng dengan lingkungan petemon, awalnya tentang masalah tempat penguburan. Secara administrasi tempat peburuan sebenarnya milik lingkungan karang genteng namun lingkungan petemon tidak menerima hal itu, jadi itulah dampak dari kesalahpahaman diantara masyarakat pagutan. Kemudian upaya yang dilakukan petua adat yaitu menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan hukum adat namun pada saat itu tidak mampu menyelesaikan dengan hukum adat dan akhirnya kasus ini diambil alih oleh Pengadilan Negeri Mataram” (Hasil wawancara, 4 Mei 2017).

Jadi penyebab terjadi konflik di masyarakat umumnya dipengaruhi oleh sikap dan pelaku, kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya ekonomi masyarakat

hal-hal itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral.

Menurut Bapak Ida Nyoman Astawa Brata bertugas ketua adat di lingkungan Tohpati, beliau menjelaskan motif perkelahian antar kampung yaitu:

“kesalahpahaman diantara kedua pelaku, secara kronologisnya ada seseorang muslim yang duduk di penggir jalan terus orang hindu olahraga pagi-pagi hingga ada kontak mata antara sesame laki-laki akhirnya berkelahi benturan fisik lalu kembali ke rumah masing-masing mengambil golok senjata tajam. Terjadilah perkelahian secara satu persatu akhirnya menimbulkan korban di pihak muslim, lalu akhirnya masyarakat kampung keberatan pada hal tersebut selama dua ahari namuntidak menimbulkan korban jiwa. Kasus-kasus tersebut akhirnya dimediasi oleh pemda, muspika, tokoh agama masing-masing pihak. Akhirnya kasus tersebut akhirnya di mediasi oleh pemerintah setempat, muspika, dan tokoh agama. Dalam peristiwa tersebut akhirnya menyepakati surat perjanjian perdamaian” (hasil wawancara, 25 April 2017).

Sesuatu hal yang mendorong anak remaja melakukan konflik dipengaruhi masalah asmara, hingga menyebar ketingkat yang lebih luas hingga terjadilah konflik antar kampung, namun kasus tersebut mampu diselesaikan aparat pemerintah yaitu ketua adat, ketua rumah tangga (RT), kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

Selanjutnya menurut Johan Firman bertugas ketua adat di lingkungan Petemon, beliau menjelaskan “motif konflik antara karang genteng dengan petemon yaitu bukan masalah agama tetapi masalah kepemilikan tempat penguburan kedua lingkungan tersebut yang kurang jelas kepemilikannya maupun fungsinya sehingga menimbulkan salah dimanfaatkan oleh salah satu lingkungan, dan satu lingkungan mengkalim bahwa tempat itu milik lingkungan karang genteng, dan akhirnya menimbulkan konflik yang berbulan-bulan” (Hasil wawancara, 22 April 2017). Jadi motif yang menyebabkan masyarakat sasak berkelahi adalah kurangnya sosialisasi pemerintah pentingnya hidup bertoleransi, kemudian kurang kuatnya peran aparat kelurahan dalam menjaga kehidupan yang aman dan damai.

Sementara menurut Hasi`in menjelaskan bahwa:

“Di Kota Mataram daerah yang konflik yang pernah saya tahu itu adalah (1) pada tahun 2001 daerah yang berkonflik adalah karang taliwang dengan tohpati dan sindu, (2) pada tahun 2013 daerah yang berkonflik adalah karang taliwang dengan tohpati, (3) pada tahun 2014 daerah yang berkonflik adalah karang taliwang dengan

monjok gara-gara masalah sampah (tempat pebuangan akhir sampah). Karena pada dasarnya bahwa karang taliwang merupakan salah satu daerah wisata kuliner sehingga sampah yang dibuang oleh masyarakat monjok berdekatan dengan daerah lingkungan karang taliwang sehingga dengan adanya peristiwa tersebut terjadilah konflik kedua lingkungan tersebut saling serang menyerang hingga menimbulkan korban jiwa, luka berat dan luka ringan". (hasil wawancara, 20 April 2017).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa di kota Mataram termasuk kategori konflik intoleransi berlatar belakang agama yaitu agama Islam dengan agama Hindu, selain itu juga ada juga konflik sesama agama yaitu lingkungan karang taliwang bermayoritas Islam dengan lingkungan monjok juga bermayoritas Islam.

Ia juga menjelaskan tentang motif terjadinya konflik di kota mataram yakni "yang pernah saya tahu, bahwa konflik antar sesama agama adalah konflik antara karang taliwang dengan tohpati, motif utama terjadinya kedua lingkungan itu disebabkan oleh minuman keras yang dilakukan oleh anak remaja kampung, perkelahian antar pelajar sehingga merembes ke perkelahian antara lingkungan". (Hasil wawancara, 20 April 2017). Motif lain penyebab seseorang berkelahi atau pengendalian diri kurang yaitu meminum minuman beralkohol sehingga merusak otaknya dan berdampak selalu memiliki perilaku yang abmoral dan suka mengoda-goda, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup selalau bersama.

Selanjutnya ia menjelaskan kronologis terjadinya konflik antar etnis, adalah sebagai berikut:

"Daerah yang konflik antar etnis adalah konflik antara taliwang dengan tohpati kelurahan cakra utara disebabkan oleh minuman keras yang dilakukan oleh anak remaja kampung, perkelahian antar pelajar, masalahnya mengganggu seorang perempuan yang dilakukan oleh pemuda karang taliwang terhadap perempuan asal tohpati yang sedang lari di sore hari. Kejadian tersebut dilakukan pada sore hari tahun 2014 dimana masalah utamanya laki-laki karang taliwang menggoda perempuan tohpati dengan menggunakan bahasa yang kurang etis sehingga si perempuan itu tersinggung dan ketika pulang ke rumahnya langsung melapor kepada kerabatnya, dan akhirnya kerabatnya tersebut mendatangi kediaman laki-laki tersebut dengan membawa senjata tajam misalnya tombak, pistol rakitan bambu runcing. Perkelahian tersebut cukup lama hampir satu bulanan belum selesai. Akhirnya aparat keamanan dan pemerintah setempat turun tangan mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi oleh pemerintah kota mataram" (hasil wawancara, 21 April 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di kota Mataram pernah terjadi konflik antar etnis, agama di tahun 2014 yaitu etnis Sasak dan etnis Bali, karena kedua lingkungan ini berbeda agama untuk etnis Sasak bermayoritas Islam dan etnis Bali bermayoritas Hindu sehingga secara tidak langsung konflik kedua lingkungan tersebut berkategori konflik antar agama, dan antar etnis. Kemudian konflik kedua etnis ini dapat di damaikan oleh pemerintahan kota Mataram melalui lembaga adat, muspika, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta melibatkan aparat keamanan baik TNI maupun Polisi dalam membantu keamanan di dua lingkungan tersebut.

Motif terjadinya konflik antar suku dipengaruhi oleh kenakanlan remaja yang sulit dikendalikan oleh keluarganya, berikut adalah penjelasan Haramain menyatakan bahwa:

"Daerah yang konflik antar suku adalah konflik antara karang taliwang bersuku Sasak dengan tohpati kelurahan cakra utara bersuku Bali disebabkan oleh minuman keras atau minuman yang memabukan yang dilakukan oleh anak remaja kampung, efek dari mengkomsumsi minuman beralkohol tersebut remaja kehilangan pengendalian dirinya sehingga sangat muda melakukan perbuatan yang tidak bermoral (perkelahian) antar pelajar, masalah yang terjadi pada saat itu yaitu mengganggu seorang perempuan yang dilakukan oleh pemuda karang Taliwang terhadap perempuan asal Tohpati yang sedang berjoging atau jalan-jalan di waktu sore hari. Kejadian tersebut dilakukan pada sore hari tepatnya hari minggu tanggal 20 Mei tahun 2014 lalu, dimana masalah utamanya seorang remaja laki-laki Karang Taliwang menggoda perempuan Tohpati dengan menggunakan bahasa kurang etis sehingga si perempuan itu tersinggung dan ketika pulang ke rumahnya langsung melapor kepada kerabat keluarga, dan akhirnya kerabatnya tersebut mendatangi kediaman laki-laki tersebut dengan membawa senjata tajam misalnya tombak, pistol rakitan bambu runcing. Perkelahian tersebut cukup lama hampir satu bulanan belum selesai juga. Akhirnya aparat keamanan dan pemerintah setempat turun tangan mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi oleh pemerintah kota Mataram" (hasil wawancara, 21 April 2017).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa motif terjadinya konflik antar suku dilatar belakangi oleh perbuatan atau tingkah laku seseorang yang kemudian merembes hingga menjadi perkelahian antar suku. Suku Sasak bertempat tinggal di lingkungan Karang Taliwang dan suku Bali berkediaman di lingkungan Tohpati, karena kedua pelaku ini memiliki suku yang berbeda dan pada

prinsipnya mereka saling mempertahankan kesukuannya karena pada sejarahnya mereka sudah hidup berabad-abad di wilayah kota Mataram. Kronologis kejadian perkelahian antara suku Sasak dengan Bali yaitu pertama, adanya perilaku tidak bermoral seperti perilaku mengganggu seorang perempuan yang kebetulan berasal dari suku Bali, kedua kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, ketiga kurangnya fasilitas keolahragaan, keempat kurang aktifnya peran mangku adat dalam menyelesaikan kasus perkelahian antara suku tersebut sehingga menyebabkan perkelahian massa, keenam aparat keamanan bersama pemerintah kota Mataram cepat mendamaikan dengan cara mediasi kedua pihak yang bertikai dan akhirnya kedua pihak sepakat berdamai, ketujuh pihak-pihak yang menjadi saksi perdamaian kedua suku tersebut yaitu ketua adat di lingkungan karang taliwang dan lingkungan tohpati, ketua RT kedua pihak, kepala lingkungan karang taliwang dan tohpati, kelurahan karang taliwang dan keluarahan cakra utara, kepala kecamatan Cakranegara dan kepala kecamatan Sandubaya. Kemudian isi perjanjian tersebut adalah tidak boleh melanggar perjanjian damai kedua pihak, jika ada yang melanggar maka akan langsung diproses hukum atau dipidanakan dengan ancaman hukuman penjara.

Sementara motif konflik intoleransi di kabupaten Sumbawa dilatar belakangi oleh hubungan asmara yang kebetulan yang perempuan beretnik Sumbawa dan laki-laki beretnik Bali. Menurut penjelasan ketua lembaga adat tana samawa (LATS) (Iskandar, diwawancara pada senin, 18 juli 2017 di ruang kerjanya mengutarakan

“kan masalah hubungan asmara kan dulunya, ya remaja hanya kebetulan saja laki-laki dari bali dan perempuan dari Sumbawa, ada konsep illa (malu) itu, kan agama itu tidak membenarkan untuk menikah dengan beda agama, inilah yang membuat masyarakat samawa malu karena mengganggu prinsip Tau Samawa, ini merupakan perbuatan tidak baik bagi orang Sumbawa lalu reaksi rasa malu ini mengkrystal atau menggemparkan masyarakat samawa karena ada orang lain yang mengganggu prinsip hidup agama lain”.

Demikian juga penjelesan Wakil Ketua Pajadu Adat Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dan Sekretaris Dewan Kehormatan Adat, menyatakan

“tidak ada koflik antar agama, yang Islam sibuk dengan Islamnya demikiannya Hindu sibuk dengan acara keagamaan, pembagian harta disesuaikan hukum yang berlaku sesuai hukum Islam atau agama lainnya diserahkan kepada agama masing-masing. Tetapi jangan ganggu harta masyarakat Sumbawa, kalau mereka mengganggu keluarganya Tau Samawa maka

disitulah tibul kemarahan masyarakat Samawa atau terganggunya keluarga mereka” (Hasanuddin, wawancara senin, 18 Juli 2017).

Selanjutnya penjelasan Sekretaris Sultan Sumbawa/Sekretaris Majelis Adat Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), menguraikan bahwa:

“Konflik di Sumbawa kami pastikan bukan isu sara, karena yg bertugas di dapur org samawa, yang menjaga rumha orang samawa, jadi itu yang menandakan konflik di samawa bukan konflik sara. Hanya kebetulan saja kejadiannya karena kenakalan remaja yang berasal dari etnis yang berbeda dari kedua pelaku ini berasal dari etnis samawa dan etnis bali itu meletus yang memang tinggal di samawa sejak lama, karena saya lihat ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan dan memprovokasi situasi saat itu terjadi kerusuhan, penjarahan, termasuk teman yg dr Lombok, Bima, Madura, dan lain-lain. Cara saya kalau terjadi gesekan sedikit saja, saya langsung menghubungi kepala adat etnis tertentu utk menangani kalau terjadi konflik.” (Syukri Rahmat, wawancara pada tanggal 18 Juli 2017).

Faktor penyebab terjadinya konflik di kabupaten Sumbawa di latar belakangi oleh hubungan asmara antara seorang perempuan beretnik samawa dan seorang laki-laki beretnik Bali. Muncul bentrokan kedua etnik ini diindikasikan ada unsur politik yang mencoba mengganggu stabilitas politik di tanah Sumbawa, selain itu konflik yang terjadi beberapa tahun lalu itu bukan isu SARA tetapi ada kesalahpahaman kedua kelompok etnik tersebut, dan kurangnya koordinasi diantara forum kerukunan umat beragama sehingga terjadi kecolongan dan akhirnya terjadi penjarahan, dan pembakaran rumah dan tempat-tempat umum. Jadi konflik di Sumbawa diindikasikan konflik individual sehingga berdampak pada konflik intoleransi antara umat beragama, dan beretnik bukan konflik SARA.

D. TEMUAN ATAU DISKUSI

Motif terjadinya konflik Intoleransi di masyarakat di Nusa tenggara Barat dipengaruhi oleh adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya lapangan pekerjaan
Tidaknya pekerjaan dan keahlian para remaja membuat mereka terbatas untuk beraktivitas, selainnya itu peran pemerintah belum maksimal dalam membina generasi muda.
2. Rendahnya ekonomi masyarakat
Rendahnya ekonomi masyarakat hal itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti perkelahian antar kampung.

3. Masalah asmara

Sesuatu hal yang mendorong anak remaja melakukan konflik dipengaruhi masalah asmara, hingga menyebar ketingkat yang lebih luas hingga terjadilah konflik antar kampung, namun kasus tersebut mampu diselesaikan aparat pemerintah yaitu ketua adat, ketua rumah tangga (RT), kepala lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

4. Kurang sosialisasi untuk bertoleransi

Motif yang menyebabkan masyarakat sasak berkelahi adalah kurangnya sosialisasi pemerintah pentingnya hidup bertoleransi, kemudian kurang kuatnya peran aparat kelurahan dalam menjaga kehidupan yang aman dan damai.

5. Konsumsi minuman memabukan

Motif lain penyebab seseorang berkelahi atau pengendalian diri kurang yaitu meminum minuman beralkohol sehingga merusak otaknya dan berdampak selalu memiliki perilaku yang abmoral dan suka mengoda-goda, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup selalu bersama.

Jadi motif konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya ekonomi masyarakat, masalah asmara, kurang sosialisasi untuk bertoleransi, dan konsumsi minuman yang memabukan khususnya para remaja kampung. Hal tersebut sejalan penjelasan berikut bahwa Faizin konflik adalah sunnatullah di muka bumi ini. Faktor-faktor yang memicu munculnya konflik itu dapat dikelompokkan menjadi faktor yang universal atau global dan faktor-faktor yang bersifat parsial[18], lainnya juga menjelaskan bahwa akar masalah yang menyebabkan sebagai salah satu daerah rawan konflik secara umum disebabkan karena persoalan politik, ekonomi, sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang[19].

E. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif konflik intoleransi pada masyarakat Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya ekonomi masyarakat, masalah asmara, kurang sosialisasi untuk bertoleransi, dan konsumsi minuman yang memabukan khususnya para remaja. Selain itu peran pemerintah daerah belum maksimal sehingga mampu menekan berkurangnya konflik intoleransi. Menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pemeliharaan lembaga adat sebagai lembaga yang mampu membantu pemerintah terutama melakukan pendampingan dan pendampingan pentingnya hidup bersama dalam perbedaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu menyelesaikan artikel ini, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] F. G. Wahid Yenni Zannuba, Vulovick Visna, Azhari Subhi M, Djafar M Alamsyah, Nisa Nurun, *Kebebasan Beragama / Berkeyakinan Dan Intoleransi*. Jakarta: The WAHID Institute dan The Body Shop, 2014.
- [2] Y. Tajudin, "Manajemen Dakwah Organisasi Islam: Menjawab Konflik Keberagamaan dan Intoleransi Kaum Radikal," *TADBIR J. Manaj. Dakwah*, vol. 1, no. 2, 2016.
- [3] N. Fuad, "Penanaman toleransi beragama pada anak melalui pendidikan," *Soc. Dei J. Agama dan Masy.*, vol. 2, no. 1, p. 252, 2015.
- [4] L. Herlina, "Disintegrasi sosial dalam konten media sosial Facebook," *TEMALI J. Pembang. Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 232-258, 2018.
- [5] R. Praselanova, "Komunikasi Resolusi Intoleransi Beragama Di Media Sosial," *Wasilatuna J. Komun. Dan Penyiaran Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 76-96, 2020.
- [6] K. H. Ahmad, A. Sakban, and M. Sudarto, "Bentuk Hidup Akur Beda Agama Antara Islam dan Budha di Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, pp. 36-47, 2019.
- [7] M. Arqi, T. Chusniyah, and A. B. Priyambodo, "Persepsi Ancaman sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jamaah Ahmadiyah pada Jamaah Nahdlatul Wathan Pancor Lombok Timur," *Univ. Negeri Malang*, 2016.
- [8] R. P. D. Lesmana and M. Syafiq, "Fanatisme Agama Dan Intoleransi Pada Pengguna Media Sosial."
- [9] B. A. Hutabarat and H. H. Panjaitan, "Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia," *Soc. Dei J. Agama dan Masy.*, vol. 3, no. 1, p. 8, 2016.
- [10] M. Baihaqi, "Pengaruh Kontestasi Politik Desa terhadap Konflik Ahmadiyah di Gegerung-Lombok Barat," *J. Sosiol. Agama*, vol. 14, no. 2, pp. 235-254, 2020.
- [11] W. Sakban, Abdul dan Resmi, "Hukum Adat Samawa sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural," in *Seminar Nasional "Kewarganegaraan Transformatif dalam Masyarakat Multikultural"*, 2017, pp. 1-8.
- [12] G. Ritzer, "Sociological Theory (Eight Edition)," *New York, Am. McGraw-Hill Co.*, 2011.
- [13] R. Fisher, "Sources of conflict and methods of conflict resolution," *Int. Peace Confl. Resolut. Sch. Int. Serv. Am. Univ.*, 2000.
- [14] A. Arifinsyah, S. Andy, and A. Damanik, "The urgency of religious moderation in preventing radicalism in Indonesia," *ESENSIA J. Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 21, no. 1, pp. 91-108, 2020.
- [15] Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," *Bandung Alf.*, 2005.
- [16] L. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Bandung PT Remaja Rosdakarya. Ed. Ke-13*, vol. 111, 2001.
- [17] A. Khalikin and S. R. Fathuri, *Toleransi beragama di daerah rawan konflik*. Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- [18] N. Faizin, "Faktor Konflik Dalam Masyarakat Perspektif Al-Quran: Kajian Tematik-Sosiologis," *JADID J. Quranic Stud. Islam. Commun.*, vol. 1, no. 1,

- pp. 25-38, 2021.
- [19] L. Silvana, "Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung," *J. Bina Praja J. Home Aff. Gov.*, vol. 5, no. 3, pp. 169-175, 2013.